

## EDITORIAL

Suhu politik di Indonesia memanas saat mendekati hari pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada 15 Februari 2017 mendatang. Saat itu ada 101 daerah di seluruh Indonesia yang akan memilih pemimpinnya, termasuk Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta yang akan memilih gubernur untuk periode 2017 – 2022. Dari sekian banyak daerah yang akan menggelar pilkada itu, hanya DKI Jakarta yang suhu politiknya memanas. Bahkan, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan bahwa Pilkada DKI 2017 ini serasa pemilihan presiden. Sementara J. Kristiadi berpendapat, “Tampaknya hal itu bukan karena DKI Jakarta adalah ibukota negara, melainkan dari perspektif pengelompokan partai politik pendukung pasangan calon. Kompetisi politik di DKI Jakarta adalah *proxy* pertarungan pemilihan presiden tahun 2019.<sup>1</sup> Sayangnya lagi, isu usang tentang SARA (suku, ras, agama, dan antar golongan) kembali dikobarkan menjelang kampanye pemilihan Gubernur DKI Jakarta.

Tahun ini, 2016, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berusia 71 tahun. Dalam usia seperti itu, negeri ini mestinya sudah bebas dari isu-isu berbau SARA. Proklamasi 17 Agustus 1945 adalah buah perjuangan semua elemen bangsa, apa pun latar belakang agama dan etnisnya. Lahirnya NKRI yang memiliki Pancasila sebagai landasan ideologi, serta UUD 1945 sebagai landasan konstitusi, adalah berkat perjuangan para pendiri bangsa (*founding fathers*) yang secara brilian mampu meneropong masa depan bangsa. Mereka sadar bahwa keragaman kepercayaan, budaya, bahasa, yang ada di bumi Indonesia ini adalah kekayaan yang harus dihargai. Singkatnya, pluralitas adalah anugerah yang harus dipelihara dan dipertahankan oleh segenap warga negara tanpa mau terkungkung oleh

---

<sup>1</sup> J. Kristiadi, “Merendam Dusta dalam Pilkada”, *Kompas* 4 Oktober 2016.

paham primordial yang sempit. NKRI adalah milik bersama, yang menjamin bahwa semua warga negara bersamaan kedudukannya. Karena itu dalam proses transformasi Pancasila ke dalam hukum dan perundang-undangan kelompok-kelompok agama tidak boleh melakukan dominasi atau hegemoni yang berakibat pada penciptaan hukum dan perundang-undangan yang diskriminatif. Sebaliknya perjuangan agama-agama dalam transformasi Pancasila dalam hukum dan perundang-undangan harus didorong oleh semangat untuk memberi keadilan bersama.

Agama-agama sejatinya harus menyumbangkan nilai-nilai yang inklusif dalam transformasi Pancasila. Nilai-nilai inklusif agama-agama ini akan menjadi landasan moral bagi bangsa Indonesia. Karena itu penciptaan undang-undang yang berlandaskan moral yang bersifat universal itu menjadi selayaknya menjadi semangat agama-agama dalam partisipasi membangun bangsa. Apabila agama-agama tetap berada dalam kodratnya, maka agama dalam dunia publik akan sangat berperan bagi terciptanya negara yang berjalan sesuai dengan kodratnya. Mengenai peran agama dalam negara Martin Lukito Sinaga mengutip rumusan Jose Casanova sebagai berikut:

1. Agama memasuki dunia-dunia publik haruslah membela, tidak hanya kebebasannya, tetapi juga kebebasan kelompok agama yang lain (jadi agama dihayati secara majemuk): dengan demikian agama-agama akan mencegah juga lahirnya absolutisme negara.
2. Agama-agama tersebut secara aktif mempersoalkan absolutisme otonomi sekuler, namun kali ini tidak dengan keinginan menggantikan atau pun menentukan jalannya negara sedemikian (sebab nanti ia akan menjadi absolut lagi), tetapi menggugat realitas secara etis.
3. Dalam ia membela "*traditional life world*" terhadap penetrasi ataupun kolonialisasi dunia teknis dan administrasi negara modern (yang anonim itu), ia tidak perlu melamun, mengimpikan suatu "*gemeinschaft*" negeri ideal agamanya yang mau dibawa hadir saat ini, tetapi menjadikan "dunia" kehidupan tradisi yang khas agamis itu sebagai sebuah wacana yang terbuka

dan didebatkan secara publik: dan menjadikannya suatu semangat dalam *"religious social movement"*<sup>2</sup>

Apabila agama-agama dapat berperan seperti yang dijelaskan di atas, maka terbentuklah masyarakat sipil yang kuat yang mempunyai daerah kekuasaannya sendiri. Di sini tampak bahwa hubungan antara negara dan agama dalam negara Pancasila menjadi jelas. Di sini, opini yang berasal dari berbagai agama dibentuk dan kemudian menimbulkan kedaulatan baru, yaitu daerah kedaulatan masyarakat sipil yang merupakan syarat penting untuk adanya negara demokrasi.

Dalam pembentukan opini-opini ini agama harus memainkan peranannya, agama-agama dapat menyumbangkan nilai-nilai moral etiknya dengan bebas. Proses pembentukan opini yang dihasilkan dari sumbangsih agama-agama ini dapat berjalan dengan baik apabila negara memberikan proteksi terhadap hak-hak sipil, kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan berserikat, beragama dan perlindungan akan ruang pribadi dan intimitas.<sup>3</sup>

Dengan adanya peran agama-agama dalam memberikan arah moral dan etik bagi negara melalui pembentukan opini yang merupakan sumbangsih agama-agama, maka agama-agama tidak akan melepaskan kontrolnya dari pemerintah. Dan pemerintah secara bersamaan juga harus menjaga proses pembentukan masyarakat sipil tersebut berjalan dengan baik melalui proteksi terhadap hak-hak sipil. Kemudian politisasi agama yang timbul karena diskriminasi agama dapat ditekan. Pemakaian agama untuk mendapatkan kekuasaan pribadi juga akan menjadi sulit karena agama-agama telah turut berperan dalam pembangunan bangsa. Jadi agama-agama menjadi agama publik yang terbuka. Agama tidak dipisahkan

---

<sup>2</sup> Victor Silaen (ed), *Pikiran-pikiran Reformasi yang Terabaikan* (Jakarta: UKI Press, 2003), 176.

<sup>3</sup> Bdk. Martin Lukito Sinaga dalam Victor Silaen, *Pikiran-pikiran Reformasi yang Terabaikan*, 178.

total dari negara, namun agama tidak boleh berkeinginan menguasai negara. Agama bukan hanya ada dalam dunia privat, tetapi ada dalam dunia publik, yang memiliki peran dalam dunia publik.

Pertimbangan dilemparnya agama dari dunia privat ke dalam dunia publik, untuk Indonesia merupakan sesuatu yang amat penting. Setidaknya, agama-agama bisa saling mengenal, sehingga menghapuskan kecurigaan antarumat beragama yang telah lama ditabur dalam proses politisasi agama. Pengenalan yang lebih baik akan agama-agama lain, secara khusus juga akan menolong agama-agama misioner dalam memahami misi agama-agama lain, sehingga konflik dapat dihindari. Dengan pemahaman atas agama lain, usaha-usaha misi agama-agama dapat dijalankan secara kontekstual tanpa harus mengkompromikan ajaran agamanya.

Bagi penganut kepercayaan, hubungan antara agama dan negara menjadi penting, karena di sini mereka juga dapat ikut serta dalam pembentukan opini publik yang dapat memberikan tempat bagi eksistensi mereka, karena perlindungan hak-hak sipil memungkinkan mereka dapat memberikan opininya. Demikian juga aliran bidat yang sering kali salah dimengerti oleh banyak orang di Indonesia, karena yang mengetahui tentang bidat umumnya hanyalah tokoh-tokoh agama. Mereka dapat memberikan opini mereka bagi pembangunan bangsa. Di sini terjadi interaksi sosial antara bidat dan agama-agama. Kemudian akan terjadi saling pengertian bersama dan akhirnya memberi tempat dalam pembentukan moral dan etik. Apalagi umumnya bidat adalah kelompok-kelompok yang memisahkan diri dari agama karena adanya hutang agama yang belum terpenuhi dalam mengemban tanggung jawab perwujudan keyakinan agamanya. Secara khusus, kedekatan antarindividu yang sering kali sangat menonjol dalam kehidupan penganut bidat, dan yang terabaikan dalam kelompok-kelompok agama yang ada.

Demikian juga penyebutan agama *mainstream* (aliran yang baku) yang menuntut hak monopoli atas kebenaran tidak lagi mendapatkan tempat,

karena hal itu sering kali dipergunakan sebagai alat untuk menindas kepercayaan lain, yang berbeda dari aliran *mainstream*. Di sini akan terjadi kebebasan dalam menafsirkan kitab suci agama-agama, yang sering kali tidak mendapatkan ruang dari agama-agama *mainstream* yang diakui sebagai agama resmi.

Hubungan antara agama dan negara memang bukan merupakan suatu hal yang mudah. Kekerasan yang biasa menghiasai hubungan antaragama dengan kecurigaan antarpemeluk agama yang tidak mudah dihapuskan ini, menjadi tantangan tersendiri bagi hubungan antara agama dan negara. Oknum-oknum yang terlalu lama menikmati kekuasaan dengan memanfaatkan agama-agama tidak dengan sendirinya akan melepaskan nikmatnya kekuasaan tersebut. Namun perjuangan semua rakyat Indonesia yang menyadari arti pentingnya negara Indonesia bagi mereka menjadi modal dalam usaha mencapai Indonesia yang lebih baik, sebagaimana dikatakan oleh Darmaputera:

Kita seharusnya berjuang bagi pengamalan Pancasila yang murni dan konsekuen, yakni pengamalan semangatnya yang inklusif dan non-diskriminasi itu, kita seharusnya berjuang bagi kesatuan dalam keberagaman Indonesia dan seharusnya berjuang bagi terbentuknya dan realisasi demokrasi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>4</sup>

Apabila perjuangan semua rakyat Indonesia yang beragama adalah perjuangan untuk pengamalan Pancasila yang murni dan konsekuen, dengan semangat yang inklusif bagi terbentuknya demokrasi yang berkeadilan, maka peran agama-agama tidak akan berubah menjadi usaha untuk saling menguasai dengan memakai negara sebagai senjata untuk meredam sesamanya. Perjuangan tersebut seharusnya menjadi perjuangan yang suci.

---

<sup>4</sup> Eka Darmaputera, *Pergulatan Kehadiran Kristen di Indonesia* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2005), 324.

Jimly Ashiddiqie, dalam buku “Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia” menegaskan: “NKRI merupakan Negara Persatuan dalam arti dalam arti sebagai negara yang warga negaranya erat bersatu, yang mengatasi segala paham perseorangan ataupun golongan yang menjamin segala warga bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan tanpa kecuali. Dalam negara persatuan itu, otonomi individu diakui kepentingannya secara seimbang dengan kepentingan kolektivitas rakyat. Selanjutnya, Jimly juga menjelaskan, “Negara Persatuan itu mempersatukan seluruh bangsa Indonesia dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena prinsip kewargaan yang berkesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Negara Persatuan tidak boleh dipahami sebagai konsepsi atau cita negara (*staatsidee*) yang bersifat totalitarian ataupun otoritarian yang mengabaikan pluralisme dan menafikan otonomi individu rakyat yang dijamin hak-hak dan kewajiban asasinya dalam Undang Undang Dasar ini.”<sup>5</sup>

Sementara Prof. Dr. Hamka Haq MA, dalam bukunya “Pancasila 1 Juni dan Syariat Islam” mengatakan: Dalam NKRI kita tidak bisa menutup mata akan keberagaman etnis, bahasa, budaya dan agama, yang sejak semula dari sananya memang sudah demikian. Maka sisi lain dari nasionalisme Indonesia adalah pluralitas (kebhinnekaan) yang harus disimpulkan menjadi satu kesatuan, sebagaimana makna dari kalimat: Bhinneka Tunggal Ika.<sup>6</sup> Maka dengan demikian jelaslah bahwa semua anak bangsa memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam membangun NKRI. Dan apabila masih ada pihak atau kelompok yang mempersoalkan latar belakang agama atau etnis seseorang, secara khusus dalam Pilkada 2017 DKI ini, tentu telah mengingkari perjuangan para pendiri bangsa ini.

---

<sup>5</sup> Jimly Ashiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), 78-9.

<sup>6</sup> Prof. Dr. Hamka Haq M.A., *Pancasila 1 Juni dan Syariat Islam* (Jakarta: RMBOKS, 2011), 104.

*Societas Dei* dalam edisi Oktober 2016 ini, menyajikan sejumlah artikel yang beberapa di antaranya relevan dengan situasi yang sedang marak mewarnai suasana Pilkada 2017. Artikel pertama berjudul: "The Relevance of God's Covenant - For A Reformed Theology of Religion" yang ditulis oleh Dirk Griffioen. Dia antara lain memaparkan, dalam wahyu Allah, struktur perjanjian yang mencakup janji-janji Allah dan jawaban Israel akan janji tersebut. Di dalam perjanjian Allah telah menyatakan diri-Nya secara pribadi baik kepada individu dan kepada umat pilihan-Nya. Selanjutnya dalam artikel kedua, Togardo Siburian membahas tentang "Menuju Kesetaraan dalam Beragama yang Berbudaya: Refleksi Seminarian Injili". Menurut Togardo, ini terkait dengan sikap etis daripada apologetis, tugas profetik gereja di masyarakat dan komitmen umat dalam toleransi beragama. Di mana membiarkan agama-agama terbanding dengan sendirinya di dalam pergaulan masyarakat sehari-hari. Ajaran agama-agama itu biar terbanding secara natural dan wajar dalam relasi-relasi kemanusiaan di tempat publik dan positif. Ini adalah penting di dalam masyarakat plural yang berperadaban pada masa kini. Ekses selalu negatif namun tetap harus ada rasionalisasinya, agar dapat dicari resolusi secara beradab. Yang terakhir ini pun dapat dilakukan oleh manusia sebagai makhluk akademikus dan makhluk intelektual. Di sinilah kita tidak takut adanya konflik sosial yang datang akibat pergaulan multikultur, namun harus ada alasan rasionalnya dalam manusia, sehingga manusia dapat belajar menjadi makhluk beradab. Selanjutnya agama masih mempunyai masa depan dalam kebudayaan dan peradaban. Karena sebagai makhluk agama, manusia sekular tidak dapat mengisi kekosongan makna eksistensi hidup yang tertinggi dengan sesuatu yang materialistik saja, sedangkan dampak negatif yang sebenarnya tidak perlu adalah reaksi fundamentalisme agama dalam menghadapi sekularisme.

Artikel ketiga, buah pikiran dari Syaiful Arif, SHi, seorang peneliti pada Perhimpunan Pendidikan Demokrasi (P2D), yang sedang menempuh

program magister filsafat di STF Driyarkara, Jakarta. Dia membahas tentang Islam, Radikalisme dan Deradikalisasi Berbasis Pancasila. Menurut Syaiful Arief, radikalisme agama yang mengembangkan paham teologis kontra-Pancasila dan NKRI bisa dilawan dan dilunakkan dengan Pancasila itu sendiri. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa penyebab radikalisme tersebut ialah kesalahpahaman terhadap Pancasila beserta sistem politik yang dinaunginya. Dalam konteks ini, deradikalisasi Islam berbasis Pancasila tidak hanya bermanfaat bagi moderasi pemahaman keagamaan, namun juga pendidikan kewarganegaraan. Hal ini yang menandakan satu fakta bahwa tumbuhnya radikalisme disebabkan oleh absennya pendidikan kewarganegaraan yang tepat bagi umat beragama. Negara terbukti alpa dengan tugas mendidik umat beragama agar menjadi warga negara yang baik, sehingga setiap umat beragama akhirnya membenturkan agama dengan prinsip-prinsip kenegaraan. Pendidikan kewarganegaraan berbasis logika keagamaan inilah yang menjadi substansi dari deradikalisasi berbasis nilai-nilai Pancasila, karena umat beragama, terutama kaum radikal Islam diajak memahami nilai-nilai agama yang sebenarnya mendasari sistem politik dan praktik kenegaraan kita.

Pada urutan keempat Edy Syahputra Sihombing membahas topik: "Menghidupi Kesejatian Agama: Tawaran yang Menggugat Eksistensi Agama sebagai Usaha Partisipatif dalam Pembangunan Indonesia". Dalam artikelnya, penulis antara lain menegaskan bahwa pluralitas agama harus diterima setiap agama. Agama hendaknya berlomba untuk berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia dan kemanusiaan, bukan berlomba untuk memperbanyak pemeluk agama sendiri. Ketika agama-agama saling menerima keberagaman ini adalah langkah kebangkitan yang besar bagi perkembangan negara Indonesia. Perang dan konflik dengan latar agama tidak memberikan keuntungan. Penerimaan dan penghormatan adalah benih kebersatuan di dalam keberagaman. Ketika benih itu berkembang menjadi kesatuan, di situlah agama-agama di Indonesia bisa saling

berpartisipasi untuk memikirkan pembangunan mental manusia Indonesia, pembangunan pendidikan Indonesia, kemajuan ekonomi, kemajuan politik dan pembangunan Indonesia bagi kesejahteraan, kerukunan, kedamaian dan keselamatan seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, Lina Gunawan, dengan artikel berjudul “Kesetaraan dan Perbedaan Laki-laki dan Perempuan: *Kritik Terhadap Gerakan Feminisme*”. Dalam artikel ini penulis membahas gerakan feminisme menurut pandangan Alkitab. Allah menempatkan perempuan di dalam subordinasi terhadap laki-laki tanpa mengurangi nilai dan kemuliaannya sebagai gambar dan rupa Allah. Perempuan tidak perlu menolak kepemimpinan laki-laki karena perempuan tetap ciptaan Allah yang setara dengan laki-laki di dalam kapasitas dan di dalam melaksanakan mandat budaya. Di dalam keluarga, Allah telah menetapkan peraturan bagi suami tentang bagaimana memperlakukan istri dengan meneladani Kristus yang mengasihi jemaat dengan tanpa syarat. Perempuan ditempatkan di bawah kepemimpinan laki-laki dengan maksud untuk dikasihi, dilindungi dan diperhatikan kesejahteraannya, bahkan suami harus rela berkorban untuk istrinya sama seperti Kristus yang rela berkorban untuk menyelamatkan gereja-Nya.